

**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN  
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI  
PADA  
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**



**TANGGAL PELAKSANAAN:  
10 – 13 APRIL 2023**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I KUESIONER SURVEI</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan Dan Sasaran.....	2
C. Kuesioner Survei .....	2
<b>BAB II METODOLOGI SURVEI</b> .....	<b>5</b>
A. Kriteria Responden .....	5
B. Metode Pencacahan.....	7
C. Metode Pengolahan Data dan Analisis .....	9
<b>BAB III PENGOLAHAN SURVEI</b> .....	<b>11</b>
A. Analisis Hasil Survei .....	11
B. Tindak Lanjut 3 (tiga) Unsur Terendah Hasil Survei.....	16
<b>BAB IV DATA SURVEI</b> .....	<b>18</b>
A. Hasil Survei Dari Aplikasi SISUPER .....	18
B. Publikasi Hasil Survei .....	19
C. Data Responden.....	19
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>21</b>
A. Kesimpulan.....	21
B. Rekomendasi .....	21
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>22</b>

# LEMBAR PENGESAHAN

## LAPORAN INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGUNA LAYANAN PENGADILAN DI PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  
Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023

Jakarta, 14 April 2023

Ketua Tim Survei



Berlin Damanik, S.H.,M.H



Mengetahui

Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta



Dr. H. Soedarmadji, S.H.,M.Hum

# BAB I

## KUESIONER SURVEI

### A. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen terhadap pencegahan korupsi, Kementrian PAN dan RB telah menerbitkan Permenpan RB Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Dalam mengakomodir pelaksanaan survei tersebut, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengeluarkan surat nomor 518/DJU/OT01.3/4/2023 perihal pengisian Survei Mandiri Zona Integritas yang berisi himbauan bagi satuan kerja yang diusulkan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM untuk melaksanakan survei mandiri tersebut melalui aplikasi **SISUPER**.

Dalam rangka mengukur persepsi anti korupsi oleh pengguna layanan terhadap Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, serta sebagai syarat pengusulan pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM, maka diperlukan adanya pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi kepada pengguna layanan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

## **B. Tujuan Dan Sasaran**

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

## **C. Kuesioner Survei**

Ruang lingkup Survei Persepsi Anti Korupsi sebagaimana tugas dan fungsi Pengadilan, meliputi: pelayanan banding perkara perdata, perkara pidana, perkara pidana khusus tindak pidana korupsi (tipikor), perkara pidana anak, pelayanan pengaduan, pelayanan permohonan informasi, pelayanan penelitian atau riset, penyumpahan advokat dan verifikasi pengguna terdaftar e-Court.

Pelaksanaan Survei ini, kuesioner yang disusun mengacu pada pedoman dari Kementerian PAN-RB dengan daftar pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah tidak ada diskriminasi pada pelayanan yang disampaikan pada unit layanan ini ?
  - Seluruh petugas pada pengadilan tidak pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya
  - Sebagian besar petugas pada pengadilan tidak pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya
  - Sebagian kecil petugas pada pengadilan tidak pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Seluruh petugas pada pengadilan pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya</li> </ul>
<p>2. Apakah tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan pada unit layanan ini ?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Seluruh pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan</li> <li>○ Sebagian besar pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan</li> <li>○ Sebagian kecil pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan</li> <li>○ Seluruh pelayanan yang diberikan oleh petugas tidak sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan</li> </ul>
<p>3. Apakah tidak ada penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada pengadilan ?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Petugas pelayanan tidak pernah menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas dll] diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan</li> <li>○ Sebagian besar petugas pelayanan tidak pernah menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas dll] diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan</li> <li>○ Petugas pelayanan sering menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas dll] diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan</li> <li>○ Petugas pelayanan selalu menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas dll] diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan</li> </ul>

4. Apakah tidak ada pungutan liar seperti permintaan pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi pada unit layanan ini ?

- Petugas layanan tidak pernah meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (Uang rokok, uang terima kasih dll)
- Sebagian besar petugas layanan tidak pernah meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (uang rokok, uang terima kasih dll)
- Sebagian besar petugas layanan sering meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (uang rokok, uang terima kasih dll)
- Sebagian besar petugas layanan selalu meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (uang rokok, uang terima kasih dll)

5. Apakah tidak ada praktek percaloan/perantara yang tidak resmi yang diterapkan pada unit layanan ini ?

- Seluruh petugas pelayanan tidak pernah melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan
- Sebagian besar petugas pelayanan tidak pernah melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan
- Petugas pelayanan sering melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan
- Petugas pelayanan selalu melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan

## **BAB II**

### **METODOLOGI SURVEI**

#### **A. Kriteria Responden**

Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi dilakukan terhadap responden/masyarakat yang mendapatkan manfaat layanan baik secara langsung maupun tidak langsung dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, baik yang datang ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), maupun secara online dengan menggunakan aplikasi SI SUPER, yang dapat diakses pada website Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta memiliki Kriteria Pendidikan Minimal SLTA dan Kriteria Pekerjaan sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
2. Advokat
3. Wiraswasta
4. Pegawai Swasta
5. TNI/POLRI
6. Pelajar/Mahasiswa

Para responden yang telah mengisi Survei Persepsi Anti Korupsi melalui aplikasi SiSuper pada link <https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/> dapat dipetakan d karakteristik sebagai berikut:

#### **A.1. Tingkat pendidikan responden**

Menurut tabel profil responden di bawah ini, mayoritas adalah S1 sejumlah 34 orang atau 87,2% dari total responden. Sementara responden dengan pendidikan terakhir SLTA DAN S2 menduduki urutan terkecil yaitu sejumlah 2 orang atau 5,1% dari total responden.



**Tabel 1**  
**Tingkat pendidikan responden**

		Jumlah	Persentase	Persentase Kumulatif
Valid	SLTA/SMK	3	7.7	7.7
	S1	34	87.2	94.9
	S2/S3	2	5.1	100
	Total	39	100	100

### A.2. Pekerjaan responden

Berdasarkan tabel profil pekerjaan responden di bawah ini, mayoritas profil pekerjaan responden adalah para Pengacara/Advokat sejumlah 17 orang atau 43,6% dari total responden. Sementara responden yang berasal dari TNI dan POLRI menduduki urutan terkecil yaitu sejumlah 1 orang atau 2,6% dari total responden.

**Tabel 2**  
**Jenis pekerjaan responden**

		Jumlah	Persentase	Persentase Kumulatif
Valid	PNS	2	5.1	5.1
	Pegawai Swasta	16	41.0	46.1
	TNI	1	2.6	48.6
	Wiraswasta	2	5.1	53.7
	POLRI	1	2.6	56.3
	Advokat/Pengacara	17	43.7	100
	Total	39		
Total		39	100	

### A.3. Kelompok Jenis Kelamin

Menurut tabel profil responden di bawah ini, mayoritas adalah laki-laki sejumlah 29 orang atau 74,4% dari total responden. Sementara responden berjenis kelamin perempuan menduduki urutan terendah yaitu sejumlah 10 orang atau 25,6% dari total responden.

**Tabel 3**  
**Jenis Kelamin responden**

		Jumlah	Persentase	Persentase Kumulatif
Valid	laki-laki	29	74.4	74.4
	Perempuan	10	25.6	100
	Total	39	100	
Total		39		

## B. Metode Pencacahan

Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

### B.1. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam survei ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

## **B.2. Lokasi Survei Dan Unit Analisis**

Lokasi survei adalah tempat dimana petugas melakukan survei terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data survei yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

## **B.3. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control**

Data yang dipakai dalam survei ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka dan berupa pilihan ganda (*multiple choice*) melalui Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (siSUPER) dengan menu pengisian data responden, pengisian layanan yang dibutuhkan responden, pengisian kuesioner serta pengisian saran dan masukan sebagaimana terlampir (Lampiran I).

Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 4 hari atau data minimal 30 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPAK.

## C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Analisis data untuk menentukan *indeks Persepsi Anti korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi anti korupsi disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi anti korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

**Pertama**, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

### C.1. Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

**Gambar 1**  
**Model alur penyusunan survei IPAK menuju Zona Integritas**



**Tabel 4**  
**Kriteria Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi**

No	Ruang lingkup
1	Diskriminasi
2	Manipulasi Peraturan
3	Hadiah
4	Biaya Tambahan
5	Percaloan

**Tabel 5**  
**Nilai Persepsi**

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

## BAB III PENGOLAHAN SURVEI

### A. Analisis Hasil Survei

#### A.1. Indikator Diskriminasi

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator diskriminasi ini menunjukkan hasil pada indeks 3,974. Indeks ini dapat diartikan bahwa seluruh petugas pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sangat bersih atau jauh dari perbuatan membeda-bedakan pengguna layanan karena faktor-faktor tertentu.

**Tabel 6**  
**Nilai Indeks Pada Indikator: Diskriminasi**

No.	Penilaian	Bobot	Frekuensi	Indeks
1.	Seluruh petugas pada pengadilan tidak pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya	4	38	152
2.	Sebagian besar petugas pada pengadilan tidak pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya	3	1	3
3.	Sebagian kecil petugas pada pengadilan tidak pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya	2	0	0
4.	Seluruh petugas pada pengadilan pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya	1	0	0
			39	155
			<b>Indeks</b>	<b>3,974</b>

#### A.2. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator manipulasi peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,974. Indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sangat bersih dari adanya manipulasi peraturan.

Semakin besar nilai indeksnya maka mengindikasikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh petugas sudah sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan.

**Tabel 7**  
**Nilai Indeks pada Indikator: Manipulasi Peraturan**

No.	Penilaian	Bobot	Frekuensi	Indeks
1.	Seluruh pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan	4	38	152
2.	Sebagian besar pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan	3	1	3
3.	Sebagian kecil pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan	2	0	0
4.	Seluruh pelayanan yang diberikan oleh petugas tidak sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan	1	0	0
			39	155
			<b>Indeks</b>	3.974

### A.3. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks 4.000. Sehingga dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bersih dari penerimaan/meminta imbalan diluar ketentuan yang ditetapkan oleh Pengadilan.

**Tabel 8**  
**Nilai Indeks Pada Indikator: Hadiah**

No.	Penilaian	Bobot	Frekuensi	Indeks
1.	Petugas pelayanan tidak pernah menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas dll) diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan	4	39	156
2.	Sebagian besar petugas pelayanan tidak pernah menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas dll) diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan	3	0	0
3.	Petugas pelayanan sering menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas dll) diluar	2	0	0

	ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan			
4.	Petugas pelayanan selalu menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas dll) diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan	1	0	0
			39	156
			<b>Indeks</b>	4,000

#### A.4. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator biaya tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000. Sehingga dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah sesuai dan tidak melakukan penambahan biaya (pungutan liar) terhadap layanan apapun di luar tarif yang sudah ditetapkan.

**Tabel 9**

#### Nilai Indeks Pada Indikator Biaya Tambahan

No.	Penilaian	Bobot	Frekuensi	Indeks
1.	Petugas layanan tidak pernah meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (Uang rokok, uang terima kasih dll)	4	39	156
2.	Sebagian besar petugas layanan tidak pernah meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (uang rokok, uang terima kasih dll)	3	0	0
3.	Sebagian besar petugas layanan sering meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (uang rokok, uang terima kasih dll)	2	0	0
4.	Sebagian besar petugas layanan selalu meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (uang rokok, uang terima kasih dll)	1	0	0
			39	156
			<b>Indeks</b>	4,000

#### A.5. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,974. Sehingga



dapat diinterpretasikan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bersih dari tindakan percaloan.

**Tabel 10**  
**Nilai indeks Pada Indikator: Percaloan**

No.	Penilaian	Bobot	Frekuensi	Indeks
1.	Seluruh petugas pelayanan tidak pernah melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan	4	38	152
2.	Sebagian besar petugas pelayanan tidak pernah melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan	3	1	3
3.	Petugas pelayanan sering melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan	2	0	0
4.	Petugas pelayanan selalu melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan	1	0	0
			39	155
			<b>Indeks</b>	<b>3,974</b>

**Tabel 11**  
**Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta**

No	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-rata
Q 1	<i>Diskriminasi</i>	3,974
Q 2	<i>Perbuatan Curang</i>	3,974
Q 3	<i>Hadiah</i>	4,000
Q 4	<i>Biaya Tambahan</i>	4,000
Q 5	<i>Percaloan</i>	3,974
<b>NRR Per RL</b>		<b>19,923</b>

Dari 5 indeks indikator di atas, maka diperoleh hasil **Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebesar 99,62% atau 3,985** Hal ini mengindikasikan bahwa persepsi anti korupsi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta adalah bersih dari korupsi.

Indeks tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan

**BERSIH DARI KORUPSI.** Nilai interval konversi Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada angka 81.26 – 100.00

**Tabel 12**  
**Mutu Pelayanan**

<b>INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)</b> <b>PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA</b> <b>PERADILAN UMUM</b> <b>TANGGAL PELAKSANAAN:</b> <b>10-13 APRIL 2023</b>	
<b>NILAI IPAK</b>	<b>RESPONDEN</b>
<b>3,98</b>	JUMLAH 39 JENIS KELAMIN : L = 29 / P = 10 PENDIDIKAN : SD = 0 SMP = 0 SMA = 3 DIPLOMA = 0 S1 = 34 S2 = 2
<b>NILAI INTERVAL KONVERSI</b>	<b>Pelaksanaan survei = 10 April 2023 s/d 13 April 2023</b>
<b>99,62</b>	
TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	

**Tabel 13**  
**Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta**

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPAK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 –100.00	4	Bersih dari korupsi

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Anti Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

**Tabel 19**  
**Isian masukan dan pandangan pengguna layanan**  
**Pengadilan Tinggi DKI Jakarta**

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
1	Tetap mempertahankan apa yang sudah diberikan dengan baik
2	Sangat baik harus dipertahankan
3	Agar di tingkatkan pelayanan yang ada
4	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang ada

**B. Tindak Lanjut 3 (tiga) Unsur Terendah Hasil Survei**

Pelaksanaan hasil survei yang dilakukan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 10-13 April 2023 berada pada kategori “**BERSIH DARI KORUPSI**”. Semua unsur penilaian telah diapresiasi secara baik oleh masyarakat, berdasarkan urutan besarnya Survei Persepsi Anti Korupsi, didapatkan 3 unsur yang mendapatkan nilai terendah, yaitu:

1. Diskriminasi;
2. Manipulasi Peraturan;

### 3. Percaloan.

Dalam menindaklanjuti 3 (tiga) unsur terendah tersebut, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

#### 1. Diskriminasi

Untuk menindaklanjuti nilai terendah ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta senantiasa memberikan arahan kepada seluruh Petugas PTSP, dan petugas keamanan yang berjaga di area *front office* serta seluruh pegawai Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk memberikan pelayanan terbaik tanpa membedakan faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya.

#### 2. Manipulasi Peraturan

Segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan, sehingga para petugas pelaksana memiliki pedoman dalam menjalankan tugasnya. Selain itu pengawas atau penanggung jawab PTSP senantiasa mengingatkan kepada para petugas pelaksana agar tetap menjalankan tugas sesuai SOP tanpa terkecuali untuk memastikan pemberian layanan yang prima kepada pengguna layanan.

#### 3. Percaloan:

Dalam hal meminimalisir tindakan percaloan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dibuat suatu sistem yaitu whatsapp khusus Informasi dan whatsapp Khusus Pengaduan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang bertujuan untuk menghindari kontak langsung antara pihak luar yang memiliki kepentingan dengan pegawai pada pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

## BAB IV DATA SURVEI

### A. Hasil Survei Dari Aplikasi SISUPER

Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 10 - 13 April 2023 berhasil meraih kategori **“BERSIH DARI KORUPSI”** dengan nilai indeks sebesar **3,98** berdasarkan nilai indeks Persepsi Anti Korupsi yang diperoleh dari perhitungan dan analisis data survei serta perhitungan yang didapatkan dari aplikasi SISUPER.



#### SURVEY ZI PERSEPSI ANTI KORUPSI

##### NILAI INDEKS

**3,98 / 99,62%**

Jumlah	39 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 29	PEREMPUAN : 10
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0	Diploma 2 : 0
	SD : 0	Diploma 3 : 0
	SMP : 1	S1 : 34
	SMU : 2	S2 : 2
	Diploma 1 : 0	S3 : 0
Pekerjaan	PNS : 2	SWASTA : 16
	TNI : 1	WIRUSAHA : 2
	POLRI : 1	TENAGA KONTRAK : 0
	LAINNYA : 17	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah tidak ada diskriminasi pada pelayanan yang disampaikan pada unit layanan ini ?	3,974
2. Apakah tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan pada unit layanan ini ?	3,974
3. Apakah tidak ada praktek percaloan/perantara yang tidak resmi yang diterapkan pada unit layanan ini ?	3,974

**Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.**

13 April 2023  
Ketua Pengadilan Tinggi

## **B. Publikasi Hasil Survei**

Publikasi informasi terkait hasil Survei Persepsi Anti Korupsi pada tanggal 10-13 April 2023 oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dilakukan melalui pemasangan poster pada ruang tunggu Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan infografis pada media sosial Pengadilan DKI Jakarta serta pada website PT DKI Jakarta di alamat <https://www.pt-jakarta.go.id/publik/laporan-publik/laporan-spak/>

## **C. Data Responden**

Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 10-13 April 2023 diikuti oleh 39 responden yang seluruhnya merupakan pengguna layanan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Adapun data dari para responden SPAK adalah sebagai berikut:

## DATA RESPONDEN

### SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

TANGGAL PELAKSANAAN: 10 – 13 APRIL 2023

No.	Nama Responden	Pelayanan	Waktu Rekam	No. Handphone
1	Muhammad Rio	Layanan Pidana	Kamis, 13 April 2023   13:48:15 WIB	089504941901
2	Lovina	Layanan Hukum / Informasi	Kamis, 13 April 2023   13:15:23 WIB	081266802024
3	Rara	Layanan Perdata	Kamis, 13 April 2023   13:11:04 WIB	895341300212
4	Erni	Layanan Administrasi Umum	Kamis, 13 April 2023   13:00:21 WIB	P 0811931946
5	Adhitya Yusra	Layanan Perdata	Kamis, 13 April 2023   10:48:40 WIB	087842147260
6	Ibnu Prabowo	Layanan Tipikor	Kamis, 13 April 2023   10:43:59 WIB	081214485344
7	Christia Tarihoran	Layanan Hukum / Informasi	Kamis, 13 April 2023   10:38:30 WIB	082183548202
8	Ida	Layanan Inzage	Kamis, 13 April 2023   10:35:42 WIB	085216582684
9	Nalowenda	Layanan Perdata	Kamis, 13 April 2023   10:17:35 WIB	081387372098
10	Khaerawati	Layanan Perdata	Kamis, 13 April 2023   10:12:50 WIB	082128361446
11	Rihardhina	Layanan Hukum / Informasi	Kamis, 13 April 2023   10:04:21 WIB	081322751993
12	TAZKIA	Layanan Perdata	Kamis, 13 April 2023   08:23:28 WIB	083846247188
13	Maria	Layanan e-Court	Kamis, 13 April 2023   07:59:07 WIB	082248673644
14	Feri Afzudi	Layanan Administrasi Umum	Rabu, 12 April 2023   15:07:57 WIB	081222252647
15	Dedy Suryawan	Layanan Perdata	Rabu, 12 April 2023   15:05:14 WIB	081318184849
16	Serlly Waileruny	Layanan Hukum / Informasi	Rabu, 12 April 2023   14:59:03 WIB	082238362024
17	Rojali	Layanan Pidana	Rabu, 12 April 2023   14:54:44 WIB	896125478666
18	Melisa Soediono	Layanan Tipikor	Rabu, 12 April 2023   13:44:51 WIB	823136222224
19	Alwi Hafizh	Layanan Inzage	Rabu, 12 April 2023   10:43:22 WIB	082268809994
20	Ryano Rahadian	Layanan Perdata	Rabu, 12 April 2023   10:42:06 WIB	0817435118
21	Maranaek Siregar, SH	Layanan e-Court	Selasa, 11 April 2023   14:11:14 WIB	081908028686
22	Rio T Simanjuntak, S.H	Layanan e-Court	Selasa, 11 April 2023   13:58:53 WIB	081806005555
23	Benny T Trisepta, S.H	Layanan Hukum / Informasi	Selasa, 11 April 2023   13:25:57 WIB	081384898097

24	Jimmy	Layanan Hukum / Informasi	Selasa, 11 April 2023   11:08:06 WIB	081908199200
25	Amal	Layanan Hukum / Informasi	Selasa, 11 April 2023   09:51:46 WIB	082139709375
26	Adzikia Aulia Rahmi	Layanan Administrasi Umum	Selasa, 11 April 2023   09:43:19 WIB	081277802197
27	Fikri	Layanan Administrasi Umum	Selasa, 11 April 2023   09:38:13 WIB	081277802197
28	Mardianto	Layanan Perdata	Selasa, 11 April 2023   09:34:28 WIB	085782296321
29	Ahmad Rais Setiawan	Layanan Pidana	Selasa, 11 April 2023   09:29:52 WIB	08114630416
30	Yasher Panjaitan	Layanan e-Court	Selasa, 11 April 2023   09:26:33 WIB	081808958596
31	Torus Hasudnga	Layanan Tipikor	Selasa, 11 April 2023   09:22:25 WIB	081314137308
32	Trixie	Layanan Hukum / Informasi	Selasa, 11 April 2023   09:11:12 WIB	81808845776
33	Budiman Barimbing	Layanan Perdata	Selasa, 11 April 2023   08:27:52 WIB	081314875645
34	Gilang	Layanan Perdata	Selasa, 11 April 2023   08:24:15 WIB	081229491096
35	Muhammad Eko	Layanan Perdata	Senin, 10 April 2023   13:22:51 WIB	082299456651
36	Tampubolon	Layanan Hukum / Informasi	Senin, 10 April 2023   13:18:31 WIB	081287858584
37	Andreas	Layanan Perdata	Senin, 10 April 2023   13:14:35 WIB	082210836994
38	Alfan Zaqiyanto	Layanan Perdata	Senin, 10 April 2023   13:11:26 WIB	081259036656
39	RS	Layanan Perdata	Kamis, 13 April 2023   15:57:15 WIB	081280007533



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta diperoleh informasi bahwa pada pengadilan Tinggi DKI Jakarta memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi sebesar 3,98 atau masuk pada kategori bersih dari korupsi

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 5 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Diskriminasi, mendapat indeks 3,974
2. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,974
3. Indikator Hadiah, mendapat indeks 4,000
4. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4,000
5. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,974

#### **B. Rekomendasi**

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,90 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi. Namun dari 5 (lima) indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Diskriminasi, Biaya Tambahan dan percaloan, memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

# **LAMPIRAN**

# MENU PENGISIAN DATA RESPONDEN INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI PADA APLIKASI SISUPER

← → ↻ ⚠ Not secure | esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/kontrol\_ipk

APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK

### Survey Persepsi Anti Korupsi | SPAK

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan.

- 1 Data Responden**  
Nama serta detail responden
- 2 Layanan**  
Layanan
- 3 Form Kuesioner**  
Isian form kuesioner SPAK
- 4 Kesan & pesan**  
mohon isi kesan dan pesan Anda

#### Data Responden SPAK

**Nama**

**Umur / Jenis Kelamin \***  tahun

Minimal 18 tahun

**Nomor HP \***

Contoh : 81211112222

**Domisili \***

**Pendidikan \***

**Pekerjaan \***

[Kembali](#) [Selanjutnya](#)

# MENU PENGISIAN LAYANAN YANG DIBUTUHKAN UNTUK RESPONDEN INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

## Survey Persepsi Anti Korupsi | SPAK

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan.

1 Data Responden  
Nama serta detail responden

2 **Layanan**  
Layanan

3 Form Kuesioner  
Isian form kuesioner SPAK

4 Kesan & pesan  
mohon isi kesan dan pesan Anda

### Layanan yang Anda dapatkan

Jenis Layanan \*

Pernah Menerima Layanan Ini Sebelumnya ? \*

Kembali

Selanjut



# MENU SARAN DAN MASUKAN UNTUK RESPONDEN INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI PADA APLIKASI SISUPER



## Survey Persepsi Anti Korupsi | SPAK

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan.

✓ Data Responden  
Nama serta detail responden

✓ Layanan  
Layanan

✓ Form Kuesioner  
Isian form kuesioner SPAK

4 Kesan & pesan  
mohon isi kesan dan pesan Anda

Mohon untuk mengisi kesan dan pesan Anda untuk meningkatkan pelayanan kami disini...

Terima kasih karena telah mengisi form Survey Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta.  
Klik Kotak dibawah 'Saya bukan robot' sebagai verifikasi Anda sebagai manusia biasa bukan sebagai bot kemudian klik tombol SIMPAN DATA dibawah untuk menyimpan data survey Anda.

Saya bukan robot 

Simpan Data

Kembali

Selanjutnya